

## RADIKALISME AGAMA DAN TANTANGAN IDENTITAS NASIONAL DI INDONESIA

Jeanie Annissa<sup>1</sup> & Ricky Widyananda Putra

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur<sup>1</sup>

Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur<sup>2</sup>

Email: [jeanie.annissa@budiluhur.ac.id](mailto:jeanie.annissa@budiluhur.ac.id)<sup>1</sup> & [rickywidyanandaputra@budiluhur.ac.id](mailto:rickywidyanandaputra@budiluhur.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Radikalisme agama merupakan suatu paham ekstrem yang mengharapkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik. Isu ini marak di perbincangkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Akar radikalisme agama di Indonesia dimulai pada saat orde lama, mengalami pembatasan paksa di masa orde baru, dan pergerakan yang massif di era pasca reformasi. Maraknya pergerakan radikalisme agama saat ini adalah bentuk akumulatif pembatasan ruang gerak mereka secara sosial dan politik sehingga mempengaruhi identitas nasional terhadap nilai kebangsaan di Indonesia. Dengan demikian, kondisi ini menjadi tantangan Indonesia di dalam memahami dan menguatkan nilai identitas nasional bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teori radikalisme digunakan sebagai alat analisis permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akar radikalisme di Indonesia terjadi dari awal pembentukan negara. Bentuk-bentuk marginalisasi terhadap kelompok agama dalam sektor ekonomi dan politik menambah daftar kecemburuan sosial. Selain itu, pemikiran agama yang sempit dalam kondisi masyarakat pluralis menambah daftar panjang pembentukan nilai radikalisme di masyarakat. Dengan demikian, radikalisme agama menjadi sebuah tantangan terhadap nilai identitas nasional bangsa Indonesia.

**Kata Kunci:** Radikalisme, Agama, Identitas Nasional, Indonesia

### Abstract

*Religious radicalism is an extreme understanding that hopes for social and political change and renewal. This issue has been widely discussed in the last 5 years. The roots of religious radicalism in Indonesia began during the Soekarno era, experienced forced restrictions in the Soeharto era,, and massive movements in the post-reform era. The current rise of religious radicalism movements is an accumulative form of social and political limitation of their space for movement so that it affects national identity towards national values in Indonesia. Thus, this condition becomes a challenge for Indonesia in understanding and strengthening the value of the nation's national identity. This study uses a qualitative method approach with analytical descriptive data analysis techniques and secondary data collection techniques through literature study. The theory of radicalism is used as a problem analysis tool. The results of this study indicate that the roots of radicalism in Indonesia occurred from the beginning of the formation of the state. Forms of marginalization of religious groups in the economic and political sectors add to the list of social equity. In addition, narrow religious thinking in a pluralist society adds to the long list of radicalism values formation in society. Thus, religious radicalism becomes a challenge to the value of the Indonesian nation's national identity.*

**Keywords:** Radicalism, Religion, National Identity, Indonesia



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Identitas nasional merupakan suatu manifestasi nilai budaya yang berkembang di dalam sebuah negara dan menjadi arah tujuan pembangunannya. Identitas nasional memiliki beragam unsur-unsur yang meliputi suku bangsa/ras, bahasa, kebudayaan dan agama. Sebagai sebuah negara Indonesia terbentuk dari beragam unsur identitas berupa ratusan suku bangsa dan kebudayaan, ratusan bahasa dan 6 (enam) agama yang diakui secara institusional. Pembentukan unsur identitas yang begitu besar dengan jumlah populasi manusia yang banyak membutuhkan sinergi dan kesadaran dari pemerintah dan warga negaranya dalam pengelolaan bangsanya.

Dengan banyaknya perbedaan dalam pembentukan unsur identitas tersebut memungkinkan untuk timbul beragam potensi konflik dan kesalahpahaman terkait nilai budaya dan agama, sehingga hal tersebut dapat menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Pengelolaan wilayah yang tidak berimbang, pembangunan yang tidak merata, dan kebebasan berpendapat yang terbatas di ruang publik dapat memicu terjadinya sikap kecemburuan sosial yang berujung kepada bentuk sikap ekstrimisme terhadap negara. Bentuk-bentuk separatisme dan gerakan radikalisme agama menjadi salah satu bukti lahirnya sikap kekecewaan terhadap sebuah negara yang tidak mengedepankan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Bahasan dalam tulisan ini menitikberatkan kepada permasalahan radikalisme agama sebagai salah satu unsur tantangan dalam identitas nasional bangsa. Radikalisme agama dapat memberikan dampak negatif yang dapat merusak tatanan sosial kebangsaan suatu negara. Abdurahman Mas'ud seorang Profesor Ilmu Sejarah Peradaban Islam pernah menyatakan bahwa gerakan

radikalisme agama dapat mengganggu stabilitas nasional Negara. Setidaknya terdapat 3 alasan mengapa gerakan radikalisme agama ini dapat mengganggu sebuah negara, yakni: *pertama*, mewarnai dan mengganti ideologi negara yang mapan dengan ideologi kelompok tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok yang lain; *kedua*, membawa instabilitas/keresahan sosial yang bersifat militan, keras, cenderung anarkhis, tidak mau kompromi; dan *ketiga*, dapat mengancam kedudukan eksistensi para elite penguasa.

Radikalisme perlu disikapi sebagai peringatan awal yang menyadarkan komponen bangsa dalam melakukan konsolidasi diri dengan upaya pembinaan umat yang lebih efektif dan kerjasama kebangsaan yang lebih kokoh.

Radikalisme sebagai sebuah gerakan sebetulnya tidak terkait dengan konotasi agama apapun, karena sejatinya agama merupakan sebuah sistem yang mengajarkan kepada sumber-sumber kebenaran dan kedamaian. Jika kita amati lebih dalam, bahwa pelaku-pelaku gerakan radikalisme dan terorisme seringkali menempatkan agama sebagai alat legitimasi atas pilihan tindakan seseorang.

Dengan demikian, radikalisme dapat merusak suasana keutuhan umat dan mencoreng kesucian agama yang transenden. Selain itu, situasi era global yang mengedepankan teknologi semakin mampu mempercepat ruang penyebaran paham radikalisme melalui ruang gerak komunikasi digital. Dalam kurun waktu cepat atau lambat jika tidak ditangani pemerintah khususnya secara serius dapat menjadi tantangan identitas nasional yang berpengaruh bagi keutuhan Indonesia sebagai sebuah negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisa data

menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur relevan berupa buku, jurnal, *working paper*, disertasi dan laporan jurnalistik media massa yang memiliki keterkaitan yang relevan dengan objek masalah yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar atau sesuatu yang bersifat mendasar hingga ke akarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, radikalisme merupakan sebuah paham atau aliran yang sangat ekstrem dalam perubahan dan pembaharuan sosial politik dengan tindakan kekerasan. Inti dari radikalisme adalah menghendaki adanya perubahan pergantian terhadap sesuatu pemerintahan di Masyarakat. Dalam aksinya selalu ada unsur pemaksaan kehendak dan kekerasan.

Tujuan dari radikalisme adalah kekuasaan dan penguasaan politik dengan mengedepankan atau memanfaatkan golongan, kelompok-kelompok primordial (suku bangsa, ras, keyakinan, keagamaan dan kepercayaan) pendekatan inilah yang digunakan untuk membangun kekuatan dan mendapatkan legitimasi dan solidaritas (Dwilaksana:2014).

Paham ini tidak serta merta hadir begitu saja tapi berkembang ke dalam arena politik di Indonesia. Radikalisme menjadi sebuah gerakan yang dimotori oleh nilai-nilai ideologis yang berkembang salah satunya disebabkan pengaruh faktor agama.

Agama merupakan sebuah sistem tata aturan yang menjadi pedoman manusia untuk hidup di dalam keteraturan dan mengantarkan keselamatan. Namun, dalam realitasnya agama seringkali digunakan sebagai “kambing hitam” untuk membenarkan suatu tindakan yang

dilakukan oleh manusia. Agama dipahami secara ekstrem dan bahkan menggunakan kekerasan sehingga melahirkan akar gerakan radikal.

Ahmad Rizky (2010:183-184) menjelaskan akar penyebab radikalisme di Indonesia karena munculnya kesenjangan social dan ekonomi karena adanya kelompok yang menguasai akses pada modal dan kekuasaan sejak era pergerakan nasional, sehingga kelompok islam politik yang tidak terakomodasi dalam struktur politik Indonesia mengambil langkah radikal dan berkarakter militeristik. Sedangkan dalam sisi ekonomi politik, dikarenakan adanya pertentangan antara kelas borjuasi yang berwajah moderat dan pro pemerintah versus kelompok marjinal. Dengan demikian, kondisi tersebut memicu ketimpangan social yang berujung aksi terorisme.

Dalam Tulisan Duo Galih juga disebutkan hasil survey lembaga Lingkaran Survei Indonesia di tahun 2015, bahwa factor ekonomi yang tidak berimbang dapat memicu terjadinya aksi terorisme. Selain karena keadaan ekonomi yang buruk, potensi untuk disisipi doktrinisasi agar bergabung dalam kelompok radikal menjadi sangat cepat mempengaruhi. Seperti contoh keterlibatan WNI dalam kelompok ISIS yang terdoktrinisasi karena iming-iming gaji 25 Juta-39 Juta dalam sepekan.

Jika kita meninjau sejarah untuk melihat akar radikalisme agama yang muncul pertama kali di Indonesia terjadi pada tahun 1950-an melalui gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo yang terafiliasi dengan nilai-nilai agama (Van Dijk, Kaptein Kees & Nico: 2006).

Gerakan DI/TII berpusat pada tujuan untuk mendirikan negara islam di Indonesia. Memasuki periode Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto, gerakan ini mengalami penumpasan dan

pengisolasian akibat bentuk-bentuk pemberontakan yang dilakukan dan berakibat pengeksekusian hukuman mati terhadap S.M. Kartosuwiryo pada tanggal 4 September 1962. Akibat hukuman tersebut, gerakan radikalisme perlahan-lahan mereda.

Memasuki tahun 1976 di bawah pemerintahan orde baru muncul juga sebuah gerakan yang bernama Komando Jihad (KOMJI) yang banyak melakukan aksi penghancuran rumah ibadah. Namun gerakan ini pada pertengahan tahun 1980-an, para tokohnya banyak yang ditangkap.

Selanjutnya muncul gerakan Front Pembebasan Muslim Indonesia (FPMI) yang melakukan serangan pula di tahun 1977. Setahun setelahnya pada 1978 terjadi kembali tindakan teror yang dilakukan oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam.

Gerakan reformasi yang menjatuhkan kekuatan Orde Baru di tahun 1998 memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan elemen bangsa termasuk perkembangan Gerakan organisasi dan kelompok kepentingan yang mengatasnamakan Islam yang semakin beragam.

Peter G. Riddle menjelaskan bahwa pasca keruntuhan orde baru, terdapat empat kekuatan Islam di Indonesia yang meliputi modernis, tradisional, neomodernis dan Islamis (Sun C.Ummah:2012). Berdasarkan pengelompokan tersebut, penafsiran gerakan-gerakan tersebut dapat dikategorisasi menjadi dua kelompok yakni liberal moderat dan radikal fundamental.

Gerakan yang mengusung kelompok liberal moderat memiliki penafsiran terbuka terhadap ajaran Islam. Dapat dikatakan gerakan ini menganut nilai-nilai beribadah dalam konteks aktual. Jaringan Islam Liberal (JIL), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKSPEDAM) NU hingga Jaringan

Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) merupakan contoh-contoh kelompok Islam dengan haluan terbuka.

Sebaliknya, gerakan Islam radikal fundamental direpresentasikan oleh gerakan kelompok Islam seperti Salafi, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), Laskar Mujahiddin, dan Ikhwanul Muslimin Indonesia. Dapat dikatakan, kelompok radikal fundamental ini menekankan kepada nilai-nilai beribadah dalam konteks ritual.

Akar dari gerakan radikalisme agama fundamental ini terbentuk dari enam faktor penyebab yakni, *pertama* adalah terdapat tekanan politik bagi eksistensi kelompoknya yang diakibatkan otoritarianisme penguasa (Azyumardi Azra:1996), *kedua* adalah faktor sentimen keberagamaan. Dalam hal ini, terdapat semangat solidaritas keagamaan terhadap penindasan yang dilakukan kelompok lain yang memiliki kekuatan tertentu. Dalam sentimen keberagamaan ini memunculkan bentuk-bentuk emosi tertentu yang menunjukkan pemahaman interpretative dan cenderung subjektif. Faktor *ketiga* adalah persoalan budaya, bahwa dalam sebuah masyarakat selalu terdapat upaya untuk melepaskan diri dari jeratan kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai (Musa Asy'arie:1992). *Keempat*, adanya faktor ideologis anti Barat. Konsepsi anti Barat terjadi karena adanya persaingan antar budaya dan peradaban. Selama ini simbol-simbol Barat menjadi penghalang dalam penegakan syariat Islam, seperti penerapan sistem demokrasi yang dianggap sebagai sistem kafir (Mukhlisin: 09 Maret 2012).

faktor *kelima* adalah kekecewaan terhadap pemerintah negara Islam yang tidak mampu memperbaiki situasi dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar sehingga memicu sikap frustrasi dan amarah dari kelompok umat Islam.

Terakhir, *keenam* adalah propaganda media massa barat yang selalu memojokan umat islam sebagai kelompok yang reaktif dan penuh tindakan kekerasan sehingga labelisasi ekstrim dan terorisme selalu dilekatkan dalam kelompok gerakan islam.

Didalam tulisan Galih Puji Mulyoto dan Galih Puji Mulyono dijelaskan beberapa hasil survey terkait penyebaran radikalisme agama di Indonesia. Lembaga lazuardi Biru dan Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2011 menjelaskan indeks radikalisme terhadap 33 provinsi di Indonesia. Terdapat 3 daerah yang rentan terhadap pengaruh radikalisme yaitu Aceh (56,8%), Jawa Barat (46,6%) dan Banten (46,6%)

<http://www.suarapembaruan.com/home/sur> . Ada juga survey yang dilakukan LIPI di tahun 2011 di Lima Universitas ternama UGM, UI, IPB, UNAIR dan UNDIP yang menunjukkan peningkatan pemahaman konservatif fundamentalis keagamaan di lingkungan kampus.

Selain itu, hasil survey Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang digawangi oleh Guru Besar Sosiologi Islam Prof Dr Bambang Pranowo di tahun 2011 mengungkapkan bahwa sebanyak 50 % pelajar setuju terhadap tindakan radikal, 25 % siswa dan 21 % Guru menyatakan Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara, 84,8 % siswa dan 76,2% Guru setuju dengan penerapan syariat islam di Indonesia. Sumber mencantumkan link

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indo](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo) yang diakses 22 Februari 2016.

Selain itu berdasarkan data BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menjelaskan bahwa sebanyak 514 WNI yang tergabung dalam ISIS dan 106 diantaranya sudah dideportasi ke Indonesia.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/> diakses tanggal 29 November 2015.

Terakhir survey yang dilakukan The Pew Research Centre pada tahun 2015 mengungkapkan di Indonesia sekitar 4 % atau sekitar 10 Juta orang WNI mendukung ISIS dan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak muda Indonesia. Penulis mencantumkan sumber data portal berita *online* melalui situs [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indo](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo) tanggal akses 22 Februari 2016.

Dengan sajian data hasil survey tersebut, gerakan radikalisme bukan lagi suatu isu kosong tetapi perlu mendapatkan penanganan tegas dari pemerintah agar masyarakat tidak mengalami krisis identitas dan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang pluralis.

### **Pembahasan**

Rumusan Identitas nasional diklasifikasi menjadi Identitas Fundamental berupa pandangan dan falsafah hidup negara. Identitas Instrumental berupa atribut kenegaraan dan Identitas Alamiah berupa karakteristik pembentuk asal negara tersebut. Dalam pendekatan identitas fundamental, Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi wujud identitas fundamental yang dalam pelaksanaannya di masyarakat masih bersifat nisbi.

Kaburnya nilai-nilai identitas fundamental bangsa dalam kegiatan bermasyarakat yang dipicu dengan ketidakadilan dan pemerataan ekonomi serta gerak dalam ruang public yang terbatas menimbulkan maraknya gerakan-gerakan radikal fundamentalisme yang khususnya berkorelasi dengan nilai-nilai agama. Indonesia sebagai sebuah bangsa dengan mayoritas penduduk beragama islam memiliki akar sejarah yang menampilkan nilai-nilai islam yang bermula pada jaman menjelang kemerdekaan hingga hari ini.

Dimulai dari pembentukan piagam Jakarta sebagai miniatur dari piagam madinah yang direvisi, pembatasan hak

bagi kelompok-kelompok agama di ruang public pada masa orde baru, hingga perpecahan kelompok islam pada saat reformasi menghantarkan bentuk kekecewaan kelompok masyarakat islam terhadap elite negara.

Oleh karena itu, tantangan identitas nasional melalui rumusan identitas Fundamental adalah upaya negara untuk menerapkan penguatan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Berupaya menyadarkan masyarakat untuk melakukan "pemurnian" terhadap nilai-nilai agama yang berkembang di masyarakat. Dalam arti pemikiran masyarakat dalam beragama tidak boleh terkontaminasi dari nilai-nilai di luar agama (ketauhidan) mereka. Dengan demikian, nilai-nilai murni ketauhidan yang "bersih" akan melahirkan manusia yang beradab walau hidup didalam keberagaman agama dan suku.

Jika terbentuk manusia yang beradab, yang saling menghormati dan menghargai maka menjadi suatu hal yang nyata untuk menciptakan nilai-nilai persatuan bangsa. Setiap masalah dan tantangan kehidupan bernegara akan dapat diselesaikan tanpa melihat kepada nilai mayoritas dan minoritas, tetapi dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Jika setiap masalah dapat diputuskan berdasarkan kesepakatan, maka mustahil untuk bersikap saling baku hantam atau tercipta kecemburuan social di masyarakat baik dalam factor ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, nilai berkeadilan social sebagai sebuah bangsa yang pluralis dapat terbentuk atas kesadaran pilihan hidup bernegara.

Berdasarkan hal tersebut, hulu dari ujung permasalahan ini berpangkal pada kehidupan beragama di masyarakat. Pemerintah perlu membenahi kembali kemurnian nilai ketauhidan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. membatasi nilai-nilai agama yang

tercampur dari unsur-unsur perusak kemurnian ajaran Tuhan.

Sejatinya nilai radikalisme muncul karena atas dorongan kehendak dan hawa nafsu manusia yang berbanding terbalik dengan unsur ajaran Tuhan. Legalisasi tindakan yang "tercampur" dan pemanfaatan Firman Tuhan dijadikan landasan pembenaran yang mempengaruhi kognisi dan memberikan efek doktrinisasi kepada umat. Kesadaran kognisi menjadi sesuatu yang terukur apabila dilahirkan kedalam sebuah tindakan atau perilaku nyata untuk mengujikan kebenaran kognisi tersebut.

Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang penting bagi Negara Indonesia untuk mencontoh Singapura sebagai sebuah negara, dalam satu sisi nilai pandangan terkait pembatasan terhadap masuknya pengaruh paham-paham agama yang terkontaminasi nilai-nilai campuran. Hal ini disadari karena memberikan efek kekacauan dan kegoncangan di dalam masyarakat untuk memahami nilai keagamaan yang mengajarkan kepada nilai keteraturan dan kedamaian.

Disisi lain, Indonesia harus menyadari unsur pembentuk identitas negara yakni sebagai sebuah bangsa yang besar dari segala sisi baik territorial maupun nilai kultural, sehingga penting untuk melakukan pembinaan terhadap paham-paham ekstrim keagamaan yang memicu tindakan radikalisme dan terorisme.

Dalam buku radikalisme agama dan tantangan kebangsaan yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam kementerian agama telah menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan tugas dan fungsi pokok untuk mengupayakan dan menanggulangi gerakan radikalisme agama melalui tindakan preventif pada pranata institusi pendidikan, lembaga keagamaan dan masyarakat(2014:98-100).

Langkah preventif yang akan dilakukan pada institusi pendidikan meliputi perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan perguruan tinggi umum, madrasah pesantren dan pendidikan agama pada sekolah yakni melalui: *pertama*, pada perguruan tinggi agama akan dilakukan pemetaan radikalisme di seluruh PTAIN, penguatan organisasi ekstra kampus; pemasyarakatan ideologisasi pancasila, dilakukan semiloka dan symposium terkait strategi preventif penanggulangan terorisme dan radikalisme agama, memperkuat regulasi kampus yang mempersempit gerakan radikalisme, memasukan materi kurikulum pada MKDU terkait terorisme dan radikalisme agama, memantau dan membimbing aktivitas kampus melalui unit kegiatan mahasiswa dan lembaga dakwah kampus dan pengembangan wawasan multicultural terhadap dosen dan mahasiswa.

*Kedua*, pada perguruan tinggi umum dilakukan pemetaan radikalisme melalui pemasyarakatan ideology pancasila, penguatan kurikulum dan materi pendidikan agama, penguatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang lebih terstruktur, semiloka dan symposium tentang islam dalam berbagai perspektif, serta pengembangan wawasan multicultural bagi dosen dan mahasiswa.

*Ketiga*, pada tingkat madrasah dilakukan penguatan kurikulum pendidikan agama melalui kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler, penguatan pembinaan kebangsaan melalui kepramukaan, penguatan peran guru BK dalam pemberian bimbingan bagi siswa yang terdeteksi terkontaminasi paham keagamaan yang menyimpang, dan memberikan wawasan multicultural terhadap guru dan siswa.

*Keempat*, dalam lingkup pesantren dikembangkan wawasan multicultural dan budaya melalui kegiatan jamboree/ kemah santri, pelatihan life skill dan

kewirausahaan, sosialisasi islam *rahmatan lil alamin*, makna jihad, pilar kebangsaan dan ketahanan nasional dan pemetaan usaha preventif bagi pesantren yang rawan terhadap ideologi radikal.

*Kelima*, adapun di sekolah umum melalui kegiatan antara lain melalui pengembangan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, penguatan peranan kelompok kerja guru, melakukan workshop, seminar, pelatihan pendidikan agama, menambah wawasan materi multicultural pada kegiatan-kegiatan pesantren kilat dan pelatihan-pelatihan bagi guru agama.

Kelima poin tersebut, menajadi arah kebijakan pemerintah didalam menanggulangi radikalisme agama pada ranah institusi pendidikan dalam upaya menyadarkan dan menguatkan nilai identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang pluralis dan multicultural di tengah tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka negara menyadari bahwa gerakan radikalisme terbentuk atas dasar pemikiran beragama yang ekstrim dan sempit. Sedangkan di sisi lain kita sebagai sebuah negara yang memiliki unsur pembentuk identitas yang pluralisme dan multikulturalisme memerlukan kemampuan berfikir dengan wawasan yang lebih terbuka dan moderat. Penguatan dalam ranah institusi pendidikan khususnya yang berbasis islam dilakukan pemerintah melalui Dirjen Pembinaan Masyarakat Kemenag RI baru sekedar melakukan pemetaan dan pengendalian terhadap penyebaran pemikiran sempit beragama. Namun, yang lebih mendasar seharusnya adalah melakukan pemahaman dan penguatan terhadap nilai-nilai aqidah islam yang murni kepada seluruh lapisan masyarakat dan memberikan ruang besar dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ibadah di masyarakat. Dengan demikian

porsi muamalah akan terbentuk dan tercipta dengan sendirinya.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam subbab-subbab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme agama muncul di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk kognisi sempit dalam memahami nilai-nilai agama. Hal ini menjadi esensi persoalan di tengah kondisi identitas alamiah Indonesia sebagai negara pluralis dan multikultural. Selain itu, pengaruh keterbatasan dan ketidakadilan dalam sektor ekonomi dan politik menjadi bagian *trigger* yang membentuk potensi gerakan

tersebut muncul di ruang public sebagai bentuk mencari atensi atau bahkan sebagai bentuk perlawanan kelompok marginal agama terhadap peran pemerintah yang dianggap tidak bisa mengakomodir kebutuhan maupun kepentingan kelompok tersebut. Dengan demikian, bentuk radikalisme agama menjadi tantangan identitas nasional bagi negara Indonesia yang memiliki nilai keberagaman sosial kemasyarakatan. Ditambah, situasi ini semakin meradang di era globalisasi yang menekankan kepada kemajuan teknologi yang bersifat heterogen dan *anonymus*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. (2010). Melacak akar radikalisme islam Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 14 Nomor 2 November 2010. <https://doi.org/10.22146/jsp.10935>
- Azyumardi Azra, 2002, Reposisi Hubungan Agama dan Negara, Merajut Kerukunan Antar Umat, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- \_\_\_\_\_, 2014. Radikalisme Agama & Tantangan Kebangsaan. Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI
- Galih Puji Mulyoto dan Galih Puji Mulyono (2017). Radikalisme Agama Di Indonesia (Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan). Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol 5 Nomor 1 April 2017. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship> . p-ISSN: 2302-433Xp e-ISSN 2579-5740
- <http://www.suarapembaruan.com/home/sur>
- [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indo](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo) yang diakses 22 Februari 2016.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/> diakses tanggal 29 November 2015.
- [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indo](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indo) tanggal akses 22 Februari 2016.
- Jeanie Annissa dan Ricky W. Putra, (2021). Radikalisme Dalam Media Sosial Sebagai Tantangan Di Era Globalisasi. Jurnal PROPAGANDA Volume 1 Nomor 2 Juli 2021 hal 83-89. <https://www.doi.org/10.37010/prop.v1i2.279>
- Masdar Hilmy (2015), Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal MIQOT Vol XXXIX Nomor 2 Juli-September 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33>
- Mohammad Takdir Ilahi, Genealogi Radikalisme Agama, Sinar harapan tanggal 7 Januari 2014
- Sun Choirol Ummah (2012),Akar Radikalisme Islam Di Indonesia. Jurnal HUMANIKA Vol. 12 Nomor 1 September 2012. DOI: <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3657>